

ANALISIS PROGRAM SP2TP (SISTEM PENCATATAN DAN PELAPORAN TERPADU PUSKESMAS) DI DALAM PELAKSAANNYA : STUDI LITERATUR

Dewi Agustina¹, Chindy Ingraini², Gustina Sari Siregar³, Siti Nurzannah^{4*}

Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara^{1,2,3,4}

*Corresponding Author : sitinurzanah22333@gmail.com

ABSTRAK

Sistem pencatatan dan pelaporan terpadu puskesmas (SP2TP) ditujukan pada pelaporan atau aktivitas informasi bersifat universal, tenaga, wadah serta strategi atau usaha dimasyarakat dalam segi pelayanan kesehatan. Target pencapaian penelitian ditujukan untuk memberikan informasi dalam implementasi kegiatan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP) pada setiap daerah. Untuk memperoleh data metode penelitian menggunakan Systematic Review berbasis pencarian secara komprehensif berdasarkan 3 buah jurnal terindeks Open Science Framework/OSF, Medline/Pubmed, dan Google Cendekia. Sampel penelitian ini menggunakan 10 referensi jurnal. Hasilnya menunjukkan bahwa (SDM) Sumber Daya Manusia telah mengalami kemajuan. Tetapi masih ada pegawai atau tenaga kerja yang merangkap kegiatan yang lain, dari segi peralatan belum cukup baik karena masih ada puskesmas yang belum ada fasilitas computer. Sedangkan untuk dana setiap puskesmas belum memiliki anggaran tersendiri pada program SP2TP. Berdasarkan pencatatan dan pelaporan masih banyak puskesmas yang menerapkan dan bekerja secara non digital walaupun sudah standarnya mempergunakan teknik komputerisasi atau digital. Sedang untuk element output (luaran) aktivitas SP2TP telah cukup mencapai standart relevansi dan keakuratannya, namun dalam segi waktu masih ada keterlambatan dalam pengiriman laporan puskesmas. Disarankan agar pihak dari pemerintah daerah dapat menambahkan fasilitas khususnya computer untuk setiap puskesmasnya, memberikan dana khusus untuk program SP2TP serta pihak dinas kesehatan memberikan pengarahan atau bimbingan dan pelatihan bagi pegawai SP2TP yang tidak pandai menggunakan teknologi computer.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Program SP2TP, Puskesmas

ABSTRACT

The Integrated Health Center Recording and Reporting System (SP2TP) is aimed at universal reporting or information activities, personnel, institutions and strategies or efforts in the community in terms of health services. The research achievement target is aimed at providing information in implementing the activities of the Integrated Health Center Recording and Reporting System (SP2TP) in each region. To obtain research method data using a comprehensive search-based Systematic Review based on 3 indexed journals Open Science Framework/OSF, Medline/Pubmed, and Google Scholar. The research sample uses 10 journal references. The results show that Human Resources (HR) has progressed. But you are still an employee or workforce who also has other activities. In terms of equipment, it's not good enough because there are still health centers that don't have computer facilities. Meanwhile, each health center does not have a separate budget for the SP2TP program. Based on the recording and reporting there are still many public health center that implement and work non-digitally even though it is standard to use computerized or digital techniques. As for the output elements of SP2TP activities, they have sufficiently met the standards of relevance and accuracy, however, in terms of time, there were still delays in sending public health center reports. It is suggested that the regional government can add facilities, especially computers for each health center, provide special funds for the SP2TP program and the health office provides direction or guidance and training for SP2TP employees who are not good at using computer technology.

Keywords : Implementation, Program SP2TP, Public Health Center

PENDAHULUAN

Menurut WHO, kesehatan didefinisikan sebagai keadaan yang lengkap dan sempurna, ditinjau dalam segi mental, fisik dan bukan sekedar bebas dari cacat dan penyakit. Maka karena itu, seharusnya usaha dan teknik kesehatan disini dapat mempunyai arti yakni kesehatan individu, kelompok atau seseorang sebaiknya selalu mengedepankan upayakan sampai pada fase yang optimal. Saat ini kita berada pada era globalisasi, dimana khalayak umum perlu mendapat pelayanan-pelayanan publik secara progresif dari pemerintah daerah dengan lebih spesifik pada pelayanan bidang kesehatan. Ketika harapan ini mampu dipenuhi, maka secara selaras peningkatan Pemerintah Daerah akan mendapat kepercayaan publik, karena masyarakat merasa puas diberi efisiensi dalam mengakses pelayanan yang masyarakat butuhkan. Dalam hal ini dari banyaknya pelayanan public Puskesmas termasuk salah satunya, dimana Puskesmas digambarkan sebagai sarana prasarana pelayanan publik kesehatan yang mengadakan implementasi upaya kesehatan dan kiat-kiat kesehatan baik secara satuan individu di tingkat satu pada wilayah kerja serta selalu mengedepankan upaya preventif dan promotif dalam mewujudkan suatu tingkatan element kesehatan yang optimal dan diatas standarisasi (Permenkes RI No. 75, 2014).

Dalam mengadakan aktivitas kesehatan yang efisien dan efektif akan dibutuhkan berita kesehatan. Dimana berita ini berupa laporan atau informasi yang seharusnya memiliki kualitas cukup efisien, sesuai waktu dan relevan supaya mampu diberdayakan bagi masyarakat menjadi dalil dalam membuat keputusan. Kemudian informasi yang dibuat dengan teknik non digital memiliki resiko yang keakuratan dan kebenaran cenderung kecil. Seperti pernyataan yang dipaparkan pada Peraturan Undang-undang Nomor 36 tahun 2009. Mekanisme SP2TP dapat menjadi pengawasan terhadap aktivitas upaya pelayanan, tenaga, sarana, dan penumpulan data umum bidang kesehatan dalam khalayak umum (SK Menkes No 63/Menkes/SK/11/1981).

Menurut Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 terkait dengan induk kesehatan warga, dipaparkan sistem keruntutan pemberitaan pemberitahuan kepada puskesmas dibutuhkan agar dapat mendorong penentuan keputusan terkait penerapan mekanisme manajemen puskesmas sebagai pencapaian target sasaran kegiatan. Berbasis SP2TP, Puskesmas diberikewajiban untuk mengumpulkan dan menyerahkan informasi transaksi pelayanan baik pelayanan seperti Unit Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Unit Kesehatan Perorangan (UKP) dengan berkelanjutan. Merujuk pada segala agenda yang di implementasikan Puskesmas, maka akan diperintahkan membuat dan menyerahkan laporan dalam setiap bulan kepada dinas kesehatan dengan menggunakan format untuk Laporan Bulanan (LB) dengan menerterakan informasi pasien didalam satu bulan, namun pada saat pelaksanaan menerapkan pembuatan laporan tidak sesuai dengan yang diharapkan karena ditemukan banyak kekurangan yakni pencatatan ganda, kesalahan pencatatan sehingga berdampak kepada ketidakbenaran hasil dari laporan yang diajukan. Kajian analisi terhadap rangkaian aktivitas SP2TP perlu sekali diperhatikan menimbang data informasi sebagai output agenda puskesmas telah dijadikan data milik puskesmas sekaligus pada ditiap element administrasi secara meningkat, yang kemudian memberikan manfaat berupa keterbukaan informasi terkait problematika kesehatan yang terdapat pada masyarakat dan juga kita akan mampu merumuskan atau mengevaluasi dengan solusi terkait cara penanggulangan tepat dan cepat. Pernyataan tersebut sejalan dengan jurnal (Samura & Silalahi, 2020) yaitu berdasarkan hasil penelitiannya secara dominan setiap puskesmas ditemukan terdapat komputer namun yang menjadi problematika, computer tersebut tidak difungsikan dalam pengerjaan membuat laporan sebagai bukti nyata pertanggungjawaban akan pelaksanaan kegiatan SP2TP, maka semakin minimnya peran indikator pendorong eksternal oleh Dinas Kesehatan dalam mengupayakan terlengkapny

dokumen SP2TP baik dalam bentuk pengawasan dan pembinaan puskesmas. Terselenggaranya kegiatan SP2TP pada puskesmas belum mampu memasuki taraf kelengkapan data yang sesuai standart struktur perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasinya yang mana akan berdampak pengerjaan yabf terkendala dan tidak lengkap.

Adapun menurut (Kemenkes RI, 2011) bahwa implementasi sistem informasi pada bidang kesehatan berada di fase kemerosotan secara nasional yakni menurunnya penyampaian data, ketepatan waktu dan kelengkapan data SP2TP yang tidak lengkap, sehingga ini disinyalir karena tidak terdapat kebijakan mengenai standar pelayanan segi kesehatan terkhusus mencakup informasi dan data yang berujung terdapatnya perbedaan persepsi pada masing-masing pemerintah daerahnya. Maka dengan demikian Sistem Informasi Kesehatan tidak mencapai standart yang diharapkan, baik format secara internal dan eksternal maupun variabel beragam, aplikasi maupun sistem yang diperuntukan tidak mampu berinteraksi dan berhubungan, dampaknya data yang didapat dari setiap daerah sangat beragam, validitas data dan akurasi data perlu diragukan, selain itu terlambatnya pengiriman data informasi puskesmas daerah ke Kementrian Kesehatan maupun Dinas Kesehatan telah menambah bukti akan ketidaktercapaian target. Maka akhirnya pimpinan pemangku kepentingan/penentu keputusan membuat keputusan bahwa kebijakan kesehatan tidak berlandaskan data maupun informasi yang benar dan akurat. Merujuk kepada analisa dari berbagai hasil kajian tentang SP2TP (Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas).

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melakukan ringkasan ulang jurnal tentang SP2TP dengan judul “Studi Literatur: Analisis Program SP2TP (Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas) Di Dalam Pelaksanaanya” dan mengetahui bagaimana SP2TP (Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas) di berbagai daerah.

METODE

Metode kajian yang diangkat menggunakan teknik Systematic Review dengan kriteria literatur mencakup pengumpulan sumber bacaan dari berbagai jurnal ilmiah yakni 3 buah jurnal terindeks Google Cendekia dan karya tulis ilmiah yang dicari secara komperhensif dan selaras. Open Science Framework/OSF dan Medline/Pubmed diawali sejak 13 Mei 2023 dan menentukan 10 artikel yang dapat digunakan sesuai standart criteria/syarat. Menemukan referensi dengan mengidentifikasi kajian artikel yang telah terbit dalam lima tahun belakangan serta artikel atau penelitian yang telah terbit dalam database digital seperti: Google Cendekia, Medline/Pubmed dan Open Science Framework/OSF. Langkah menemukan referensi artikel terdahulu juga dilakukan sebagai studi tambahan yang berhubungan (relevan) dengan menyaring dan memindai artikel terdahulu tentang gagasan yang dipilih serta menghapus artikel belandaskan kriteria eksklusi dan inklusi. Agar mendapatkan keseluruhan maksimum kutipan sebaiknya relevan, menggunakan kata kunci sebagai dasar pencarian kajian judul dan ini menjadi teknik untuk mempermudah analisis dalam kajian yang digagas.

HASIL

Input (Masukkan)

Sumber Daya Manusia (SDM)

Mengelola Sumber daya Manusia (SDM) menjadi hal yang teramat penting yang dikemukakan oleh Schuler dan Jackson (1997). Pernyataan tersebut tidaklah terbantahkan, mengingat SDM menjadi sentral dalam pencapaian tujuan organisasi (Lijan Poltak S. 2016). Terdapat masalah khususnya SDM tenaga pengelola SP2TP yaitu masalah pada element kualitas dan kuantitas. Berdasarkan hasil penelitian Pada element kuantitas memang

mencapai kesesuaian kebutuhan tapi pada element kualitas belum mencakup kebutuhan disebabkan karyawan yang seharusnya mengelola SP2TP baik tugasnya pada pencatatan dan pelaporan masih banyak merangkap pada tugas-tugas lain yang buka tugasnya. (Ghaniy et al., 2020), pernyataan ini sejalan dengan hasil penelitian (Sary et al., 2021) yang menyatakan bahwa program SP2TP belum berjalan dengan baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang dimana karyawan yang menyelenggarakan kegiatan SP2TP merupakan karyawan yang fokus menjalankan agenda-agenda program pelayanan kesehatan lainnya sehingga mengakibatkan adanya rangkap jabatan. Penelitian lain yang sejalan yaitu hasil penelitian jurnal (Handayuni, 2019). Yang menyatakan bahwa petugas Puskesmas Nanggalo dalam SP2TP tidak ditemukan karyawan jurusan D3 informasi kesehatan dan rekam medis karena karyawan tersebut di posisikan pada bagian depan yakni posisi atau ruang rakam medis atau piker yang tidak relevan dengan program yang mereka tangani. Hal ini sejalan juga dengan hasil penelitian (Daniyanti & Firdaus, 2020) yang menyebutkan bahwa Koordinator SP2TP masih diperankan kepada karyawan kesehatan yang memiliki kewajiban terhadap agenda lain pada puskesmas tempat karyawan tersebut.

Peralatan

Peralatan merupakan penunjang bagi pemenuhan kelengkapan untuk mempermudah mengerjakan suatu data SP2TP. Peralatan yang minim juga menjadi kendala besar bagi setiap puskesmas karena hal itu dapat mempersulit suatu data untuk SP2TP. Berdasarkan hasil jurnal (Ghaniy et al., 2020). Pada puskesmas Sukamerindu mengalami kendala yaitu tidak tersedianya laptop pada fasilitas kesehatan tepatnya pada tiap ruangan petugas menggunakan computer atau laptop milik pribadi untuk menunjang agar pelaporan SP2TP tetap berjalan dan lancar. Dengan minimnya ketersediaan peralatan pada puskesmas, mereka berharap untuk pengadaan unit laptop atau komputer dan printer untuk kelancaran pengelolaan SP2TP sehingga tidak mengganggu berbagai aktifitas puskesmas khususnya ruang tata usaha. Hal ini sejalan dengan penelitian (Sary et al., 2021). Sarana prasarana digital yang mendukung seperti perangkat komputer yang terdapat pada Dinas kesehatan Kabupaten Pasaman Barat belum maksimal dilengkapi pada lingkungan kerja puskesmas sedangkan pada kantor dinas kesehatan telah terlengkapi. Penelitian lain yang sejalan yaitu (Handayuni, 2019) yang mana dari hasil penelitiannya fasilitas peralatan penyelenggaraan SP2TP belum terdapat seperti printer dan komputer serta masih ditemukan menggunakan printer ruangan TU dan komputer ruangan program. Adapun permasalahan lain tentang peralatan adalah buku pedoman pembuatan laporan SP2TP. Yang mana berdasarkan hasil penelitian (Daniyanti & Firdaus, 2020) bahwa buku pedoman pembuatan laporan SP2TP tidak dimiliki, yang mana landasan akan difungsikan pada pengelolaan SP2TP yang merupakan format secara wajib dari Dinkes. Adapun penelitian lain yang sejalan yaitu (Laura, 2018) dari hasil penelitiannya bahwa panduan penyelenggaraan SP2TP yang belum terdistribusi, sehingga diambil keputusan oleh Kementerian Kesehatan serta tidak distrukturkan Juknis SP2TP baik dari pemerintah kota Padang menjadi yang mana termasuk indikator penghambat berjalannya penyelenggaraan SP2TP disebabkan puskesmas tidak memiliki panduan dan acuan terkait bagaimana semestinya SP2TP diterapkan.

Dana

Pendanaan dijabarkan sebagai salah satu sumber cangkupan daya yang berdampak terhadap tata kelola. Namun berdasarkan implementasinya SP2TP pada puskesmas tidak memiliki ketersediaan biaya atau dana tersendiri oleh dinas kesehatan, sehingga biaya pengerjaan SP2TP menggunakan dana tersendiri dari puskesmas, tapi hal pendanaan masih memadai sehingga dana pada SP2TP ini tidak terlalu berpengaruh menurut (Samura & Silalahi, 2020). hal ini selaras dengan target kajian analisis (Sary et al., 2021) dimana di

dalam hasil penelitiannya bahwasannya tidak terdapat dana khusus, disebabkan SP2TP sudah berbentuk pekerjaan umum yang rutin dilakukan, yang mana telah menjadi kewajiban puskesmas mengadakan dalam bentuk laporan terhadap segala pekerjaan yang dilaksanakan di puskesmas. Jadi sebaiknya laporan tetap dikumpulkan sesuai jadwalnya dan biaya bukan termasuk indikator penghambat dalam penyelenggaraan SP2TP. Penelitian lainnya yang sejalan yaitu (Daniyanti & Firdaus, 2020) penganggaran khusus untuk penerapan SP2TP di puskesmas Grajagan tidak terdapat anggaran konsultasi laporan, transport sebagai biaya rapat, dan pengantaran laporan SP2TP. Selanjutnya hasil penelitian lain yang sejalan adalah (Handayuni, 2019) bahwa tidak adanya dana khusus di puskesmas Nanggalo Padang dalam penerapan SP2TP namun dalam bentuk penanggung jawab yang berkaitan akan memperoleh hadiah berupa poin, maknanya saat akhir bulan karyawan memperoleh poin kinerja terhadap jasa bertugas yang dilakukannya. Berdasarkan kajian penelitian lainnya yaitu meskipun dana pendukung tidak dimiliki terhadap keberlangsungan mekanisme SP2TP ini, namun agenda ini telah menjadi aktivitas wajib dan rutin di puskesmas jadi petugas kerja khusus SP2TP ini mungkin sudah lumrah terhadapnya banyaknya berbagai pelaporan yang karyawan isi sesuai dengan tugas yang akan dikerjakan (Ghaniy et al., 2020). Jadi dapat disimpulkan dari berbagai hasil peneliti bahwa di puskesmas tidak memiliki dana khusus untuk program SP2TP.

Process (Proses)

Pecatatan

Pecatatan adalah salah satu bagi untuk menjaga suatu data SP2TP. Pencatatan yang manual dapat mengurangi ke falitan data SP2TP. Berdasarkan hasil jurnal (Sary et al., 2021) saat mencatat SP2TP di Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat terlihat menggunakan teknik manual berbasis alat tulis yakni kertas, blangko dan pulpen yang memang tersedia diakibatkan kurang pengetahuan pegawai menggunakan teknologi dan masih terdapat yang mengetik jika mempunyai sarana pribadi yakni laptop. Adapun penelitian yang sejalan yaitu hasil penelitian (Handayuni, 2019) di puskesmas Nanggalo dalam penyelenggaraannya kegiatan mencatat dilakukan non digital, padahal dalam puskesmas sudah terdapat aplikasi E-Puskesmas namun tidak maksimal di berdayakan dengan tepat. Hasil penelitian berkesinambungan dengan kajian analisis (Daniyanti & Firdaus, 2020) yang menyatakan mekanisme mencatat SP2TP di puskesmas Grajagan terdeteksi menggunakan teknik non digital berupa pengarah SP2TP yang meminta hasil laporan disetiap bulan kepada setiap penanggung jawab program kegiatan, karena SP2TP selaras dan berkelanjutan dengan SIMPUS pencatatan kecuali dari laporan setiap bulan para pemegang tiap-tiap agenda dan juga termasuk laporan SIMPUS.

Pelaporan

Sistem pelaporan diharapkan mampu memberikan informasi baik bagi puskesmas maupun untuk jenjang administrasi yang lebih tinggi, guna mendukung manajemen kesehatan (Rizki A & Arni R.R, 2021). Tinjauan hasil penelitian (Daniyanti & Firdaus, 2020). Pelaporan SP2TP oleh puskesmas Grajagan diselenggarakan oleh pengarah SP2TP berdasarkan hasil salinan yang di buat oleh yang mengerjakan atau ketua agenda di puskesmas tersebut untuk diverifikasi. Pihak koordinator SP2TP membentuk susunan laporan bulanan kepada setiap penanggungjawab program agenda di puskesmas. Sesudah laporan dikumpulkan dan laporan disatukan menjadi satu, yang kemudian akan diperiksa kepala puskesmas dan ditanda tangani oleh kepala puskesmas jika semua laporannya telah memenuhi. selanjutnya di kirimkan ke lembaga dinas kesehatan kabupaten. Rangkaian ini selaras dengan hasil penelitian (Handayuni, 2019). Untuk pelaporan puskesmas Nanggalo di antarkan kepada pengarah SP2TP yang sebelumnya di rangkum oleh program yang terbagi-

bagi dan dicek kembali sehingga laporan yang telah memenuhi selanjutnya diantar kepada dinas kesehatan kota dalam rentang waktu 2 hari. Lain dengan peraturan pemberian laporan diterapkan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat yang mana pelaporan dilaksanakan dibawah tanggal 20 oleh para penanggungjawab program SP2TP yang kemudian akan disatukan sesuai dengan bahan yang berikan oleh para penanggungjawab agenda. Seandainya terdapat keterlambatan maka pemegang program dianjurkan mengirimkan langsung kepada dinas kesehatan kabupaten (Sary et al., 2021).

Output (Luaran)

Komponen output berupa puskesmas menyampaikan laporan tepat waktu ke Dinas Kesehatan (Ristya Widi, dkk. 2021). Ketidaktepatan waktu pemberian penerimaan laporan dapat mentidakstabilkan mekanisme memutuskan kebijakan. Pernyataan ini sejalan dengan hasil penelitian (Sary et al., 2021) yaitu puskesmas yang cenderung dominan terlambat dalam penyeteroran laporan setiap bulannya seperti Puskesmas Aia Gadang, Sasak, Kajai dan Silaping. Pengamatan analisis ini bertolak belakang terhadap kajian analisis (Daniyanti & Firdaus, 2020) yang menyatakan bahwa puskesmas Grajagan tahapan penyerahan laporan SP2TP dari koordinator dilakukan dalam waktu yang sesuai dan sampai sekarang belum ada mengalami ketidaktepatan waktu dalam penyerahan terhadap Dinas Kesehatan Kabupaten.

PEMBAHASAN

Input (Masukkan)

Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya yang memadai akan meningkatkan keunggulan dalam pelaksanaan kegiatan program organisasi tersebut. Dalam mencapai keberhasilan sumber daya manusia adalah faktor masukan (input) terpenting (Eka Suci & Nailufar, 2020). Menurut Kesehatan RI Tahun 2011 semua tenaga Sistem Informasi Kesehatan (SIK) harus memiliki kompetensi, kompetensi merupakan kemampuan dan keahlian yang harus dimiliki petugas SP2TP, dalam pelaksanaan SP2TP petugas harus memahami bidang kesehatan baik aspek klinis maupun program kesehatan. petugas SP2TP juga harus mampu melakukan kegiatan statistik bidang kesehatan, memiliki kemampuan dalam bidang teknologi dalam bidang informasi. Berdasarkan dari berbagai hasil penelitian jurnal bahwa permasalahan SDM ini berasal dari beban kerja yang mereka terima, seorang koordinator SP2TP harus mengerjakan tugas rangkap sebagai pengelola program SP2TP juga sebagai pemegang program puskesmas lainnya. Hal ini berdampak kepada tidak maksimalnya koordinator SP2TP melakukan pekerjaannya sebagai pengelola program SP2TP karena harus mengerjakan program puskesmas yang juga mempunyai target yang harus mereka capai, sehingga kegiatan SP2TP sering terabaikan. SP2TP digambarkan menjadi bagian dari element (SIMPUS) yakni Sistem Informasi Manajemen Puskesmas yang memerlukan tenaga pengelola agar membentuk SDM. Sumber daya manusia (SDM) akan ditargetkan dalam hal ini yaitu telah adanya SDM pada karyawan yang memegang dan ikut andil teknis SP2TP di setiap puskesmas. Tetapi terdapat masalah khususnya SDM tenaga pengelola SP2TP yaitu masalah pada element kualitas dan kuantitas Berdasarkan dari berbagai hasil penelitian jurnal pada sub bab Sumber daya Manusia (SDM) bahwasannya masih banyak petugas puskesmas yang bekerja tidak sesuai dengan element kualitas belum mencakup kebutuhan disebabkan karyawan yang seharusnya mengelola SP2TP baik tugasnya pada pencatatan dan pelaporan masih banyak merangkap pada tugas-tugas lain yang buka tugasnya. Jadi menurut kami keberhasilan suatu pelaksanaan SP2TP sangat ditentukan oleh faktor manusia yang melaksanakan kegiatan sistem informasinya. Dimana pengetahuan dan keterampilan adalah hal dasar yang harus dimiliki oleh setiap petugas yang melaksanakan kegiatan sistem informasi kesehatan. Maka dari itu,

sudah seharusnya pihak puskesmas perlu memberikan pembekalan kepada para petugas untuk meningkatkan sumber daya manusia yang kompeten dan dapat diandalkan. Agar dapat melaksanakan kegiatan pencatatan dan pelaporan SP2TP secara efektif dan efisien.

Peralatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 sarana dan prasarana yang seharusnya ada untuk mendukung SP2TP adalah komputer, formulir laporan, jaringan internet, dan alat transportasi dalam penyampaian laporan SP2TP. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penunjang membantu kelancaran kegiatan program SP2TP. Dimana penunjangnya merupakan computer di masing-masing ruangan, wifi/jaringan internet untuk membantu sistem online ke pusat dan terdapat buku panduan dan kendaraan yang digunakan untuk mengantar laporan ke Dinas kesehatan Kabupaten (Eka Suci & Nailufar, 2020). Pada peralatan yang dimaksud adalah dalam ketersediaan peralatan dalam pendukung dan kelancaran pada mekanisme SP2TP yaitu pada komputer untuk pengelolaan SP2TP dan mobil sebagai kendaraan umum puskesmas yang dipergunakan karyawan untuk mengantarkan laporan seperti ke kantor kesehatan kota. Bersumber pada jurnal (Ghaniy et al., 2020). setiap puskesmas mengalami kendala akan minimnya unit komputer, kemudian sarana prasarana jaringan *wifi* masih ditemukan belum terlengkapi maksimal di berbagai puskesmas. Adapun permasalahan lainnya yaitu tentang tidak ditemukannya tidak adanya buku panduan SP2TP atau petunjuk teknis SP2TP yang seharusnya dimiliki puskesmas (Sary et al., 2021). Untuk bagian transportasi berdasarkan berbagai hasil penelitian banyak petugas yang mengantarkan laporan SP2TP menggunakan kendaraan sendiri bahkan mengeluarkan uang pribadi untuk membeli bahan bakar transportasi. Jadi menurut kami keberhasilan suatu pencatatan dan pelaporan SP2TP sangat dipengaruhi oleh peralatan yang memadai di dalam puskesmas, dengan lengkapnya peralatan yang ada dapat memudahkan petugas SP2TP dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Maka dari itu diharapkan pihak puskesmas dapat melengkapi peralatan untuk kebutuhan petugas SP2TP.

Dana

Dana adalah anggaran dengan perannya begitu urgensi dalam sebuah agenda pada suatu kelembagaan atau organisasi. Dalam organisasi anggaran dana digambarkan sebagai hal yang berfungsi paling besar dalam suatu agenda. Perumusan strategi dengan tujuan dan program semaksimal mungkin perlu dilandaskan indikator pendorong berupa anggaran yang sesuai. Dari berbagai hasil penelitian jurnal yang sudah diteliti bahwa dapat disimpulkan puskesmas tidak memiliki dana khusus untuk program SP2TP. Menurut Maximilianus (2020) Menyatakan bahwa faktor keuangan merupakan sesuatu yang vital terhadap terlaksananya berbagai aktivitas pelayanan publik, karena dengan adanya dana dalam suatu organisasi dapat mempengaruhi perkembangan sebuah organisasi dalam memberikan pelayanan yang terbaik. Namun dalam hal pelaksanaan SP2TP di puskesmas tidak disediakan dana khusus oleh Dinas Kesehatan, sehingga dana yang selama ini dibutuhkan dalam pelaksanaan SP2TP berasal dari dana puskesmas, dan hal tersebut dirasakan masih memadai dalam puskesmas. Karena adanya tanggapan seperti itu maka dana khusus untuk program SP2TP tidak ada. Pendanaan merupakan salah satu sumber daya yang berpengaruh terhadap kinerja. Biaya merupakan sejumlah uang yang disediakan dan dipergunakan secara langsung untuk mencapai tujuan kegiatan. Faktor keuangan yang merupakan tulang punggung bagi terselenggaranya aktivitas pelayanan publik. Adanya pendanaan dalam suatu organisasi memegang peranan penting dalam kegiatan organisasi. Tujuan yang telah dirumuskan dengan strategi dan program sebaik apapun harus diikuti dengan dukungan anggaran yang memadai. Jadi menurut kami dana juga merupakan hal penting dalam keberlangsungan proses program SP2TP. Adanya dana khusus bagi program SP2TP akan lebih membantu petugas pelaksana program tersebut dalam

membuat laporan yang dibutuhkan dengan lebih baik lagi. Tetapi hal yang paling penting adalah adanya tanggungjawab petugas terhadap laporan yang mereka kerjakan untuk melindungi dirinya secara badan hukum dan memenuhi tanggungjawabnya dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan.

Process (Proses)

Pecatatan

Sistem pencatatan secara umum terbagi dalam dua bagian yaitu sistem pencatatan tradisional dan sistem pencatatan non-tradisional. Dimana sistem pencatatan tradisional adalah sistem pencatatan yang memiliki catatan masing-masing dari setiap profesi atau petugas kesehatan. Dimana sistem pencatatan tradisional memiliki kelemahan yaitu data yang belum tentu akurat karena masing menggunakan penulisan yang manual jadi kemungkinan data bisa salah tulis, sedang sistem pencatatan non-tradisional dilakukan langsung menggunakan komputer yang mana sudah terhubung ke aplikasi untuk pencatatan dan kemungkinan untuk salah lebih minim (Novi Wulan, dkk. 2020). Pencatatan kegiatan puskesmas mencakup RKK dengan beragam bentuk mencakup register nomor indeks, kartu status, kartu KB, register kunjungan dan KTP, serta mencatat kegiatan diluar gedung puskesmas serta mencata/merekap informasi agenda diluar dan didalam kantor puskesmas. Dari berbagai hasil jurnal penelitian di dapat bahwa masih banyak puskesmas yang menggunakan pencatatan secara manual. Pencatatan dengan cara yang masih manual lebih memakan banyak waktu karena harus menunggu laporan dari masing-masing pemegang program. Pencatatat terkait laporan kegiatan bulanan lebih efektif jika langsung mensikronisasi dengan laporan SP2TP, kesinambungan SIMPUS dan SP2TP sebenarnya sudah memudahkan untuk mengakses data secara online tanpa harus mengumpulkan dari masing-masing pemegang program (Eka Suci & Nailufar, 2020). Adapun yang menyebabkan masih adanya pencatatan manual yaitu karena kurangnya pengetahuan pegawai menggunakan teknologi seperti komputer dan kurangnya fasilitas komputer di setiap puskesmas tersebut. Adapun hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pencatatan SP2TP yaitu dengan memberikan bimbingan dan pelatihan bagi pegawai puskesmas yang tidak mengerti menggunakan teknologi dan pemerintah daerah dapat menambah unit teknologi computer bagi puskesmas di setiap daerah mereka.

Pelaporan

Pelaporan adalah agenda dalam menstrukturkan sejumlah data yang diperoleh dari sumber pencatatan yang dilaporkan terhadap element bersangkutan sebagai gambaran bentuk pemberitahuan atau pertanggungjawaban akan output agenda yang sudah terlaksana. Sistem pelaporan SP2TP yaitu kegiatan pelaporan puskesmas secara menyeluruh dengan konsep wilayah kerja puskesmas. Pelaporan terpadu puskesmas SP2TP menggunakan tahun kalender yaitu dari bulan januari sampai dengan desember di tahun yang sama (Rizki A & Arni R.R, 2021). Dari berbagai hasil jurnal penelitian bahwa sistem pelaporan di setiap puskesmas ada yang sudah berjalan dengan baik dan ada juga yang belum berjalan dengan baik salah satunya yaitu berdasarkan hasil penelitian (Sary et al., 2021) yaitu di temukan tanggal penyeteroran laporan bulanan SP2TP Puskesmas tidak tepat waktu atau lewat dari pada tanggal 3 dibulan berjalan yang telah ditetapkan dari peraturan yang berlaku. Pelaksanaan SP2TP memiliki pengetahuan mencakup terkait pengetahuan yang menjadi isi laporan termasuk, bahan pelaporan juga waktu yang dituntut terpenuhi sebagai bentuk penyelesaian dan pengiriman laporan. Adanya terlambat waktu dalam pelaporan yaitu disebabkan tidak maksimalnya pengetahuan pada petugas SP2TP dapat menjadi idnikator penghambat pengelolaan dan pengerjaan SP2TP tersebut karena pengetahuan yang sedikit dan juga indikator ini semakin kuat dengan dukungan dari analisi kajian analisis berdasarkan jurnal (Majid & Ukkas, 2019)

minimnya pengetahuan tenaga pelaksana yang memang seharusnya menjadi modal dalam pengerjaan SP2TP telah mempengaruhi kualitas kerja yang akan dilakukan kedepannya dan ini tentu berkaitan terhadap pengimplementasian pelaporan yang kadang kala tidak mencapai standarisasi persyaratan baik dari sudut pandang keterlambatan dalam pembuatan dan kelengkapannya. Jadi berkaitan dengan permasalahan pengiriman laporan SP2TP puskesmas dapat membimbing petugas yang kurang pengetahuannya tentang sistem pelaporan selanjutnya pihak instansi puskesmas dapat memberikan dukungan berupa *reward* yang dapat di jadikan kompensasi bagi petugas dengan tanggungjawab ganda dan dukungan fasilitas yang memadai.

Output (Luaran)

Output (luaran) yaitu tentang keakurat, relevan, tepat waktu dan lengkapnya laporan. Penyelenggaraan program SP2TP yang dilaksanakan di setiap puskesmas. kesesuaian waktu pelaporan merupakan penerimaan atau penyampaian menjadi indikator dasar dalam proses laporan yang merujuk pada pertimbangan laporan sehingga perlu agar dilakukan pengambilan kebijaksanaan secara berkala atau dalam situasi tertentu. Berdasarkan dari berbagai hasil jurnal penelitian di dapat bahwa untuk bagian *output* ada yang sudah berjalan dengan baik untuk tepatan waktu dan ada juga ya belum yaitu pada hasil penelitian (Sary et al., 2021) yang menyatakan dari hasil dilapangan pada saat penelitian mendapatkan informasi bahwa terdapat 3 puskesmas yang terlambat melakukan penyeteroran laporan bulanan. Jadi menurut kami penyampaian laporan secara tepat waktu akan mempermudah dalam mengambil suatu keputusan, terutama jika ada laporan yang salah dapat di perbaiki kembali sesegera mungkin. Dengan adanya penyampaian laporan secara tepat waktu petugas dapat mengetahui terkait hasil dari setiap kegiatan yang sudah dilakukan. Dimana ketepatan waktu pelaporan menjadi faktor yang penting dalam penerimaan arus laporan dengan mempertimbangkan laporan yang diperlukan sebagai bahan pengambilan suatu kebijakan pada saat tertentu atau berkala, dan keterlambatan penerimaan laporan dapat menyebabkan pengambilan keputusan tertunda atau terganggu. Maka dari itu diharapkan petugas dapat memberikan laporan secara tepat waktu agar dapat mempermudah penerimaan laporan SP2TP.

KESIMPULAN

SP2TP adalah suatu rangkaian mekanisme pencatatan dan pelaporan terpadu puskesmas akan digunakan untuk aktivitas serta pelaporan informasi secara universal, upaya, keahlian dan wadah pelayanan kesehatan di masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia (SDM) di setiap puskesmas masih merekap program lain di luar pekerjaan mereka di bagian SP2TP, selanjutnya peralatan computer untuk kebutuhan pekerja pencatatan dan pelaporan di daerah puskesmas rata-rata belum memiliki fasilitas teknologi computer, di bagian dana setiap puskesmas tidak memiliki dan khusus untuk program SP2TP ini, untuk pencatatan dan pelaporan masih memakai teknik manual yakni menggunakan blangki, kertas dan pulpen untuk mengerjakan hasil pencatatan dan pelaporan adapun hal lain yaitu kurangnya pengetahuan pegawai menggunakan computer yang mengakibatkan adanya keterlambat penyerahan hasil laporan SP2TP. Disarankan agar pihak dari pemerintah daerah dapat menambahkan fasilitas khususnya computer untuk setiap puskesmasnya, memberikan dana khusus untuk program SP2TP serta pihak dinas kesehatan memberikan pengarahan atau bimbingan dan pelatihan bagi pegawai SP2TP yang tidak pandai menggunakan teknologi computer.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami sebagai penulis mengucapkan terimakasih kepada dosen pengampu mata kuliah administrasi puskesmas yang telah memberikan kami pelajaran bagaimana membuat jurnal

dan membuka wawasan kami tentang administrasi puskesmas yaitu salah satunya tentang program SP2TP dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada ibu yang terus membimbing kami sampai jurnal ini selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- Daniyanti, E. S., & Firdaus, N. (2020). ANALISIS SISTEM PENCATATAN DAN PELAPORAN TERPADU PUSKESMAS (SP2TP) DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS GRAJAGAN KECAMATAN PURWOHARJO KABUPATEN BANYUWANGI. *Jurnal Ilmiah Ilmu Keperawatan*, 85–92.
- Ghaniy, R. A., Efendi, S., Wulan, S., & Triyanto, D. (2020). Analisis Penerapan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP) Puskesmas Sukamerindu Kota Bengkulu. *VISIKES: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 19(1), 83–97. <http://publikasi.dinus.ac.id/index.php/visikes/article/view/3764>
- Handayuni, L. (2019). *Analisis Pelaksanaan Sistem Pencatatan Dan Pelaporan Terpadu Puskesmas Nanggalo Padang*. 29, 147–151.
- Laura, S. (2018). *Analisis Pelaksanaan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP) di Kota Padang Tahun 2018*. 8(3), 700–707.
- Majid, M., & Ukkas, D. (2019). *KAJIAN SISTEM PENCATATAN DAN PELAPORAN TERPADU PUSKESMAS (SP2TP) WILAYAH KERJA PUSKESMAS LAKESSI KOTA PAREPARE Study Of Integrated Puskesmas (SP2TP) Listing And Reporting System Of Lakessi Health Center In Parepare City*. 1(1).
- Samura, M. D., & Silalahi, N. (2020). *Pengaruh Kualitas Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP) Terhadap Tata Kelola Administrasi*. 3(2), 220–225.
- Sary, A. N., Dewi, A., & Kurniawan, T. (2021). Analysis of the Implementation of the Integrated Registration and Reporting System of Public Health Center in Health Office of Pasaman Barat District. *Jurnal Kesehatan Medika Sainatika*, 11(1), 1–10. <https://jurnal.syedzasaintika.ac.id>
- Vanesha M. J. Koilam, T. T. (2023). Analisis Rencana Anggaran Biaya dan Anggaran Pelaksanaan Pada Proyek Pembangunan Puskesmas Remboken Rawat Inap. *Tekno*, 21(83), pp. 168-177.
- Suryanto, H. (2020). Analisis Beban Kerja dan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Petugas Rekam Medis Puskesmas Adan-adan Kabupaten Kediri. *Jurnal Rekam Medis dan Informasi Kesehatan*, 3(1), pp. 29-35.
- Widianto Pancaharjono, D. F. (2020). Faktor- Faktor yang Memengaruhi Jaminan Kualitas Peralatan di Puskesmas. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan*, 4(2), pp. 44-52.
- Novi Wulan Sari, H. A., & Ika Nirmala Masliah, S. M. (2020). *TEORI DAN APLIKASI EPIDEMIOLOGI KESEHATAN*. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Ristya Widi Endah Yani, K., & Ari Tri Wanodyo Handayani, H. H. (2021). *PRAKTEK KERJA LAPANG MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN (PKL MPK)*. Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember.
- Rizki Amelia, A. R. (2021). *SISTEM INFORMASI KESEHATAN (Kajian Covid-19 Melalui Sistem Informasi Kesehatan)*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Sinambela, L. P. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.